

KRITIK IDEOLOGI ATAS GERAKAN ANTI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Usman

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: usmanmbabsel@gmail.com

Abstract

Step Real Counteract Communist Movement that contrast to Human Right through Education: A Critique Ideology. This discussion describes the emancipatory critical social theory of Jürgen Habermas antithesis to the ideology of Marxist-Leninist-Maoist-Communist Party. It Explained that the concept of rationalization of community development; emancipatory form of social interaction, has proceeded in a fair and balanced. Include: the rationalization of technical/job dimensions, rationalization of practice/dimensions of interaction or communication, and rationalization of the system/power dimension. By this, they can expand the technical mastery of the external world, capable of conditioning the situation of human communication that is free as well, and may set technical goals and practice themselves perfectly. This is the development of community/human to fit his (human), without getting stuck in ideology. While the Marxist-Leninist-Maoist-Communist Party, stuck into a one-sided rationalization, ie technical/instrumental action, so that people/humans evolved in shades of rational action aims/production (reification of self; mechanical, linear, scientific, and indoctrination (ideological), because there is no interaction and communication. His idea can be implemented through his educational concept. First, human beings should lead to the achievement of human beings capable of managing the world with shades of deep understanding (hermeneutics and Verstehen) the reality of his next life, as well as in dialogical relations system; equivalent, communicative, and egalitarian. Second, it must be supported by a curriculum that be able to nurture the potential of cognitive interests: technical, practice and emancipatory. Third, it must be realized by the method of learning with the theoretic and practical model.

مستخلص

منع ريال مدريد من خلال التعليم الخطوة الشيوعية بغير انسانية: نقد أيديولوجية. هذه المناقشة تصف النظرية النقدية الاجتماعية يورغن هابرماس كما التحررية المضادة للماركسية

ليئنيية للماوين- الأيديولوجية. الشيوعية الاندنسي. وأوضح أن مفهوم ترشيد تنمية المجتمع؛ التحررية شكل من التفاعل الاجتماعي، يجب أن يتم بطريقة عادلة ومتوازنة. يسلط الضوء على ما يلي: ترشيد التقنية / الأبعاد العمل، وترشيد التطبيق العملي / أبعاد التفاعل أو التواصل، وترشيد نظم / البعد السلطة. مع ذلك فإنها تمكن أن توسيع إتقان التقنية على العالم الخارجي، وقادرة على تكييف الوضع والتواصل الإنساني الخالية، وربما وضع أهداف التقنية والتطبيق العملي أنفسهم تماما. هذا هو تنمية المجتمع المحلي / تناسب الإنسان لها (الإنسان)، دون أن يعلقوا في الفكر. في حين أن الماركسية اللينينية الماوية-الحزب الشيوعية الاندنسي، تمسك إلى ترشيد من جانب واحد، أي التقنية / جوهري الإجراءات، حتى أن الناس / البشر يتطور في ظلال العمل العقلاني تهدف / الإنتاج (كأدوات نفسه)، وخطي الميكانيكية، العلمية التي يعلم (الأيديولوجية)، وذلك لأن لا يوجد التفاعل والتواصل. هابرماس فكرة يمكن تطبيق من خلال مفهوم تربيته. /ولا، الرجل، كما هدف تربيته المسودات، ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق كائنات بشرية قادرة على إدارة العالم الخارجي مع ظلال من فهم عميق (تفسيري / فورسطينون) إلى واقع حياته المقبلة، وكذلك في نظام العلاقة الحوارية؛ ما يعادلها، التواصلية، والمساواة. ثانيا، يجب أن تكون معتمدة من قبل المناهج الدراسية التي هي قادرة على النمو إمكانات المصالح المعرفية؛. التقنية، التطبيق العملي، والتحررية /ثالثا، يجب أن تتحقق من قبل أسلوب التعلم / المناهج بالعلم- والعمل. وبناء على ذلك لايمكن ان الشيوعية الاندنسي- المكسي الينيي- الموي النموذجي.

Keywords: Ideologi, Anti Hak Asasi, Indonesia, Komunis, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Idiologi *Komunisme-Atheisme-Marxisme* ortodoks, masuk ke Indonesia sejak zaman Belanda lewat tokohnya Hendrik Sneevliet (dikenal dengan Marin) dan mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*), di Surabaya tahun 1914.¹ Untuk membesarkan organisasi itu, para tokohnya seperti Tan Malaka, Semaun, Muso, Darsono dan Alimin, masuk ke partai dan organisasi yang maju

¹ John D. Legge, *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*, terj: Tim PSH., (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hal. 69.

saat itu seperti Sarekat Islam (juga Budhi Utomo, dll). Tujuannya ialah menjadikan partai dan organisasi itu sebagai kendaraan untuk menyampaikan aspirasinya yang radikal.² Cara tersebut bisa terjadi sebab partai dan organisasi pada waktu itu jarang menerapkan aturan yang ketat untuk melarang anggotanya berpartai/berorganisasi ganda. Namun karena melihat tidak adanya manfaat untuk menerima kelompok minoritas radikal (ISDV) tersebut, maka kelompok konservatif S.I memaksa kelompok ISDV keluar. Kondisi inilah yang menjadikan ISDV merombak dirinya menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920.³

Sejak keluar dari S.I, PKI semakin radikal, terutama setelah pertemuan para pemimpin mereka pada Desember 1925 di Prambanan.⁴ Pertemuan itu memutuskan bahwa PKI harus melakukan tindakan yang lebih radikal dan terbuka. Maka pemberontakan I dimulai pada November 1926 di dua daerah; Jawa Barat dan Sumatera Barat, serta dibarengi dengan pengumuman terbentuknya sebuah Republik. Tentu saja ini dihancurkan oleh kolonial Belanda dan pada 1927 PKI dinyatakan terlarang. Namun mereka tetap bergerak meski di bawah tanah.⁵

Setelah gagal tahun 1926, selaku tokoh PKI yang dibuang Belanda, Muso pulang dari Moskwa tahun 1935 untuk menyusun kekuatan baru. Akan tetapi ia tinggal hanya sebentar di tanah air, dan kemudian PKI bergerak dalam berbagai organisasi, seperti Gerindo dan serikat-serikat buruh. Tahun 1948, PKI melakukan lagi pemberontakan di Madiun, dengan tokohnya Semaun, Darsono dan Alimin. Alasannya ialah tidak terakomodasinya secara mayoritas tokoh PKI dalam Kabinet Presidential yang dibentuk Soekarno, setelah bubarnya kabinet Syarifuddin dan pindahnya Ibu kota ke Yogyakarta, serta terjadinya agresi Belanda kedua pada 1948.⁶ Dalam kondisi kacau itulah PKI mengambil

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal.77.

⁴ *Ibid.*, hal.104-105.

⁵ Anonym. dikutip dari [http:// wikimediafoundation.org/](http://wikimediafoundation.org/) // diunduh 18 April 2012.

⁶ John D. Legge, *Soekarno: Sebuah Biografi Politik...* hal. 262-263.

kesempatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Akan tetapi hal itu dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia.

Perkembangan berikutnya PKI masih mampu mengkonsolidasi kekuatannya. Ini terbukti dengan tetap eksisnya di bumi Indonesia, bahkan pada Era Orde Lama terjadi hubungan yang erat dengan Presiden Soekarno. PKI melakukan infiltrasi ke semua instansi negara, terutama militer.⁷ Puncak hubungan PKI dengan pemerintahan Soekarno ialah demi cita-cita idiologi masing-masing. Soekarno demi Marhaenismenya dan PKI demi Marxis–Leninisme–Maoisme. Kemudian keduanya muncul dalam langkah politik berupa retuling terhadap DPR, yang cukup hanya diwakili oleh tiga partai: Nasionalis–Agama–Komunis/NASAKOM.⁸ Peluang besar itu dimanfaatkan PKI untuk melakukan pemberontakan, yang kemudian dikenal dengan G 30 S. PKI.⁹

Tampaknya idiologi di atas tidak diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ini ditandai dengan gerakan penumpasan G 30 S. PKI. yang dikomandani militer dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tindakan keji PKI sangat membekas pada masyarakat dan membikin trauma mereka. Oleh karena itu masyarakat, dengan TRITURANYA, bersama pemerintah dengan tegas minta dibubarkannya PKI di Indonesia.¹⁰ Meskipun sudah ditumpas habis dan dilakukan pembinaan mendasar dengan idiologi Pancasila, tetapi dipastikan bahwa idiologi komunis masih ada di Indonesia dan diusahakan untuk dikembangkan kembali, walaupun dalam bentuk gerakan bawah tanah. Ini ditegaskan oleh kantor berita Tass (Uni Soviet) tahun 1969 setelah berlangsung Konggres Partai Komunis Sedunia.¹¹

⁷ A.H, Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 5 Kenangan Orde Lama*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hal. 30 – 31.

⁸ *Ibid.*, hal. 6 – 7.

⁹ Soegiarto, Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai: G 30 S PKI dan Peran Bung Karno*, (Jakarta: Intermasa, 1988), hal. 388–389.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 239–258.

¹¹ *Ibid.*, hal. 351.

Selain itu memang sebagian besar kaum komunis cenderung mengikuti teori Revolusi Permanennya Leon Trotsky.¹² Kemudian sinyalemen tanda-tanda lain gerakan bawah tanah itu dimulai dengan munculnya *radikalisme* lewat Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dipimpin Budiman Sujatmiko dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) sebagai organisasi *onderbouwnya*. Dalam Anggaran Dasar Partainya, PRD tidak mengazaskan perjuangannya kepada Pancasila maupun agama tertentu, melainkan yang sifatnya kerakyatan semesta dan demokrasi.¹³ Di samping juga ada (pengakuan terselubung) yang dinyatakan oleh salah satu pimpinan Komite Pimpinan Pusat PRD, Mirah Mahardika dalam wawancara dengan Wikimedia:

Akhir-akhir ini terdengar berita yang menjadi hangat di antara para aktivis pro-demokrasi, yaitu rencana kediktatoran Orde Baru yang akan menyatakan PRD dan beberapa organisasi lain sebagai OT (Organisasi Terlarang). Seperti yang diberitakan SiaR tanggal 27 September 1997, ada 32 organisasi yang tergabung dalam aliansi besar Majelis Rakyat Indonesia (MARI) yang akan dinyatakan sebagai OT. Rencana pengumuman OT itu, menurut informasi yang kami dapat, adalah tepat pada 30 September nanti, yaitu tepat peringatan G.30.S. PKI. Sebab, organisasi yang dinyatakan OT pastilah akan diidentikkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁴

Demikian pula dalam pernyataan sikap menyambut ulang tahun ke-52 revolusi 17 Agustus 1945, PRD menegaskan:

Hari ini, tanggal 17 Agustus 1997 merupakan hari yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dalam menuju kebebasan, karena hari ini genap 52 tahun usia revolusi kemerdekaan bangsa kita. Usaha merebut kemerdekaan telah dilakukan dengan penuh pengorbanan oleh para pahlawan kita, khususnya oleh kaum revolusioner. Perjuangan membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme-imperialisme telah dilakukan secara bahu-membahu oleh semua kelompok dan partai politik di negeri ini, baik oleh kaum nasionalis, kaum komunis, kaum Islam, kaum Katholik, kaum Kristen, kaum sosial demokratik, dan sebagainya.¹⁵

¹² Anonymous, dikutip dari [http:// wikimedia foundation.org/](http://wikimediafoundation.org/) diunduh 18 April 2012.

¹³ Anonymous, dikutip dari www.prd.4-all.org diunduh 18 April 2012.

¹⁴ Anonymous, dikutip dari <http://wikimediafoundation.org/>, diunduh 18 April 2012.

¹⁵ *Ibid.*

Bukti lain berupa pemutarbalikan fakta sejarah. Yakni tuduhan tentang dalang pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di KOMNAS HAM (terutama oleh ketuanya Abdul Halim Garuda Nusantara) merupakan labeling politik yang memojokkan PKI. Padahal G 30 S PKI terkait dengan rencana dan masalah internal TNI AD.¹⁶ Upaya lain berupa usulan sebagian guru di Jawa Tengah tahun 1999 agar Mendiknas mencabut pernyataan keterlibatan PKI tersebut. Pada tahun 2005 Mendiknas dan Menko Kesra hampir memenuhi tuntutan itu. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena ada penolakan Tim 9 yang dipimpin KH. Yusuf Hasyim. Demikian pula tuntutan oleh Tapol dan Napol kepada pemerintah untuk mencabut TAP MPRS XXV/1966 lewat LSM-LSM tahun 2003 tentang pelarangan komunisme di Indonesia. Akan tetapi semua itu ditentang oleh elemen masyarakat yang anti komunisme, seperti Front Anti Komunis Gabungan se-Jawa, Persatuan Masyarakat Anti Komunis Bandung/PERMAK, Front Anti Komunis Yogyakarta/FAKY, serta Masyarakat Anti Komunis dan CICS Jawa Timur.¹⁷

Fakta tersebut membuktikan bahwa ideologi dan gerakan komunisme yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia ini masih ada. Lalu bagaimana langkah nyata untuk menangkal hal itu? tulisan berikut ini diajukan analisisnya. Pembahasan dimulai dari dasar pemikiran komunisme hingga menjadi ideologi dan gerakan *radikal*. Kemudian dilanjutkan analisis mengenai konsep pendidikan sebagai langkah nyata untuk menangkal ideologi itu. Pertanyaannya, kenapa mesti pendidikan? Jawabannya *pertama*, karena melalui pendidikan bisa dilakukan perubahan dasar pemikiran dan ideologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas tanpa dibarengi pelanggaran HAM, jika dibandingkan dengan cara lain: militer, hukum, ekonomi, dsb. *Kedua*, pendidikan pada hakekatnya berlangsung seumur hidup. Untuk itu jika dasar pemikiran telah tercerna oleh suatu generasi lewat pendidikan, maka yang bersangkutanlah yang melanjutkannya melalui *self-education* dalam rentang kehidupannya.

¹⁶ Firoz Fauzan, *Civil War Ala PKI 1965: Menyingkap Dewan Revolusi PKI*, (Jakarta: Accelerate, 2011) Foundation, hal. i.

¹⁷ *Ibid.*, hal. ii-iv.

B. Pembahasan

Deskripsi tulisan ini dimulai dari, *pertama*, dasar pemikiran komunisme, meliputi: pemikiran *Marxis-Leninis-Maois-PKI* dan tahap kesadarannya jika ditinjau dengan teori tahap kesadaran Paulo Freire. *Kedua*, penemuan konsep pendidikan dengan dasar pemikiran komunis tersebut. *Ketiga*, pembahasan tentang langkah nyata pendidikan yang bisa menangkal idiologi komunis. Untuk itu perlu dibahas tentang Teori *Kritis* Jurgen Habermas sebagai *antitesa* pemikiran dasar *Marxis* (sekaligus *Leninis-Maois-PKI*). Juga pemikiran dasar pendidikan Habermas yang dapat digunakan sebagai penangkal idiologi tersebut (PKI).

1. Dasar Pemikiran Komunisme Marxis-Leninis-Maoi-PKI

Berawal dari penyebaran dan pengokohan pemikiran *Marxisme-ortodox* yang berpijak pada penafsiran *positivisme* terhadap ajaran Marx, bahwa sistem *kapitalisme* akan segera hancur secara alamiah dan kemudian disusul serta diganti dengan munculnya sistem *sosialisme*. Ini didasarkan pada hipotesa Marx dalam *Das Kapital*, yang menyatakan bahwa dengan semakin berkembangnya *kapitalisme* berarti semakin terkonsentrasikannya modal pada kaum kapital dari kaum *proletar*. Hal itu menyebabkan bertambahnya kelas proletar, secara otomatis kekuasaan akan beralih ke kelompok proletar. Namun dalam perjalanannya realitas seperti itu tidak pernah ada. Bahkan oleh Eduard Bernstein (seorang cendekiawan *Marxis*), dinyatakan bahwa asumsi itu tidak akan terjadi karena kaum kapitalis pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Pendapat ini dianggap sebagai *Revisionisme* oleh pengikut *Marxisme-ortodoks* (termasuk Lenin) dan ditentangnya. Selanjutnya pemikiran *kritis* Marx, oleh kaum *ortodoks* tersebut, diselewengkan dan dibekukan dalam bentuk keyakinan *Idiologis*. Ini terbukti dengan terbentuknya aliansi buruh sedunia dengan poros pengendalinya Uni Soviyet, yang justru menimbulkan tindakan anti demokrasi. Ini sesungguhnya berlawanan dengan

gagasan awal Marx yang ingin memerdekakan masyarakat dari belenggu kaum *Borjuis/Kpitalis* lewat *sosialismenya*, dalam bentuk masyarakat *komunal/komunis*.¹⁸

Kemudian Lenin, dengan *Marxisme-ortodoksnya*, lebih menekankan pada *determinisme* ekonomi sebagaimana Marx itu sendiri dan itu menjadi dasar *dialektika materialismenya*. Artinya sejarah ditentukan serta diawali oleh kiprah (pekerjaan/ produksi) manusia yang paling dasar seperti memenuhi kebutuhan makan, minum, dan berpakaian, sebelum melakukan tindakan lain; bernegara, berpolitik, seni, hukum, dsb. Dengan kata lain sejarah dimengerti atas dasar *dialektika* ekonomi dengan struktur kelas sosial. Jika ini terjadi maka muncul kelas sosial berdasar hak milik dan itu akan menghambat perkembangan, maka akhirnya memunculkan perubahan sosial yang itu sifatnya pasti *revolusioner*.

Di samping itu juga hal tersebut melahirkan bentuk masyarakat baru tanpa kelas. Akan tetapi gagasan Marx tersebut ditolak ketika Lenin menyadari bahwa revolusi tidak akan muncul dengan sendirinya sebagaimana teori Marx; yang menganggap revolusi akan terjadi sebagai akibat melemahnya *kapitalisme* secara alamiah (akibat perluasan pasar, produksi gila-gilaan yang berujung pada jatuhnya harga). Lenin justru melihat revolusi bisa terjadi kalau partai mau melakukan revolusi.¹⁹

Untuk kepentingan itu maka perlu kekuatan yang tersatukan dan terpusat serta dikuasai oleh negara. Artinya perlu *kapitalisme* negara, yakni negara mengadministrasi hak milik. Itulah pembelokan *Marxisme* menjadi sebuah ideologi oleh Lenin dan yang sekaligus membedakannya dengan Marx.²⁰ Padahal bagi Marx, dalam komunisme tidak ada kelas sosial, tidak ada hak milik pribadi, alat produksi diurus langsung oleh yang bekerja di situ. Jadi negara bukan sebagai alat untuk tindakan *totaliter*, sebab dalam *totalitarianisme* perbedaan kelas muncul kembali dan dalam bentuk kediktatoran oleh segelintir kaum elit. Negara adalah untuk kesejahteraan bersama, oleh karena itu yang tepat adalah berupa *sosialisme* negara dalam *proletariat*. Negara boleh ada hanya sementara

¹⁸Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 5.

¹⁹Rodee, C.C. et.al., *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal. 172-173.

²⁰*Ibid.*

dalam rangka nasionalisasi. Ini ditujukan untuk menyingkirkan *kapitalis*. Jika mereka sudah tidak ada dan tidak menjadi ancaman, maka negara menjadi hilang dan masyarakat terbentuk secara *komunal* (komunis).

Selanjutnya *Maoisme*, merupakan *Marxisme* yang khas Mao Zedong. Dalam hal ini *dialektika* sejarah *Marxis* difahami sesuai kondisi riil masyarakat Cina. Ini merupakan wujud semangat nasionalismenya, walaupun tidak berarti sefaham dengan *confusianisme*. Jika *Marxisme* memandang revolusi akan berakhir setelah tercapainya masyarakat *komunal*, yang berarti munculnya *sosialisme* negara dalam *proletariat*, maka bagi *Maoisme* revolusi tidak akan berakhir. Negara juga harus ada karena ia menjadi wadah bagi nasionalisme Cina, sehingga keberadaannya sangat bernilai. Jadi bukan seperti Lenin yang memandang negara hanya sebagai alat pengadministrasian kepentingan masyarakat *komunal*.²¹ Itulah wujud pembekuan pemikiran *kritis* Marx ke dalam ideologi dan langkah politis yang khas Cina. Pembekuan itu juga terlihat pada konsep politik Mao tentang "garis massa", yang kemudian dikenal dengan selogan "dari massa, untuk massa". Maksudnya bahwa kebijakan politik partai yang bagus jika gagasan itu secara murni bersumber pada massa (petani dan pekerja), dengan selalu memperhitungkan kepentingan dan keinginan mereka. Dengan kata lain implementasi kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari massa.²²

Pemikiran dan tindakan Mao tersebut cukup moralis, sehingga dapat dikatakan bahwa gagasannya telah merubah teori "*materialisme-dialektik*" Marx, menjadi "*moralisme-dialektik*". Mao Zedong berpendapat bahwa dalam rangka *transformasi* masyarakat tradisional ke moderen yang khas Cina (berupa kemajuan industrialisasi) harus dibarengi dengan penanaman *sosialisme* sebagai landasan moralitas masyarakat. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan menjamin kelanggengan masyarakat baru yang diharapkannya. Strategi *moralisme-dialektis* tersebut merupakan program "Lompatan Jauh ke Depan" (*the Great Leap Forward*) yang dilakukan pada tahun 1958-1959. Ini dimaksudkan untuk

²¹ F.M Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme...* hal. 170-171.

²² J.C.F., Wang, "Values of the Cultural Revolution" dalam *Journal of Communication*, vol. 27, no. 3 (1976), hal. 55.

menebus kesalahan strategi pertamanya. Yakni yang hanya menitik beratkan pada pembangunan industri semata. Tujuan strategi itu untuk mengubah Cina menjadi suatu negara *sosialis* industri yang modern secepat mungkin. Guna mewujudkan langkahnya secepat mungkin, maka pelaksanaannya boleh melompati tahap-tahap normal pembangunan supaya memperpendek jalan menuju *sosialisme*. Terkait dengan itu pula maka kesadaran masyarakat harus dirubah menuju kesadaran *sosialis* yang kuat dan sekaligus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.²³

Kemudian bagaimana dasar pemikiran komunisme di Indonesia (PKI)? Tampak tidak jauh beda dengan yang dikembangkan oleh Lenin dan Mao Zedong. Yakni pemikiran *keritis Marxis* dibelokkan menjadi sebuah idiologi. Langkah politik untuk mewujudkan idiologi itu di tempuh dengan cara yang sangat *radikal*, menghalalkan segala cara serta keji, sebagaimana yang muncul dalam bentuk pemberontakan tahun 1926 di Sumatera Barat dan Jawa Barat, peristiwa Madiun 1948, dan G. 30 S. PKI 1965. Kesimpulan ini didasarkan pada data bahwa tidak ada pemikiran filosofis *keritis-Marxisme* yang khas Tan Malaka, Muso, D.N Aidit, dll., yang dikembangkan di Indonesia, selain hanya memanfaatkan idiologi *Leninis-Maois* yang sudah mendunia untuk kepentingan ambisi pribadinya.

2. Tahap Kesadaran Masyarakat Yang Dibangun Marxisme

Dari pembahasan di atas dapat difahami bahwa tahap kesadaran masyarakat yang dibangun oleh komunisme *Marxis-Leninis-Maois*-PKI ialah tingkat kesadaran *sosialis*. Akan tetapi implementasinya dalam bersosial, berpolitik, dan bernegara pada *Marxisme* Karl Marx, berbeda dengan ketiga penganutnya tersebut (Lenin, Mao Zedong, dan tokoh-tokoh PKI). Pada ketiganya *sosialisme* diwujudkan secara *radikal*, *totaliter*, dan *anarkhis*. Padahal

²³ E. L. Wheelwright, & Mc. Farlane, B. (ed.), *The Chinese Road to Socialism: Economics of the Cultural Revolution*, (London: Penguin Books, 1973), hal. 80.

langkah itu sangat ditentang oleh Karl Marx, sebagaimana kritiknya terhadap Mikhail Bakunin (hidup tahun 1814-1876) dari Rusia.²⁴

Dengan meminjam teori Paulo Freire tentang tahap kesadaran masyarakat, maka dikatakannya ada tiga, yaitu *semi-intransitif*, *transitif-naïf*, dan *transitif-kritis*.²⁵ Tahap *semi-intransitif* ditandai dengan dikuasainya manusia oleh mitos-mitos yang diciptakan oleh kekuatan sosial. Sikap dan perilaku mereka tidak berdasar kemandirian, tetapi dikomando oleh suasana yang dibentuk oleh kelompok yang dipandang masyarakat *mitis* sebagai yang layak dipatuhi. Mereka hidup dalam kondisi tertindas, *inferior*, tidak percaya diri/rendah diri, dan suasana psikologis lain yang seperti itu.²⁶

Kemudian tahap *transitif-naïf* ialah kesadaran yang lebih melihat sisi manusia sebagai penyebab permasalahan hidup. Misal masalah etika, kreatifitas, dll., muncul oleh karena faktor manusianya sendiri yang memang pemalas, tidak punya semangat untuk bangkit dan merubah nasibnya, tidak punya semangat wirausaha, dsb.²⁷

Berikutnya tahap *transitif-kritis*, yaitu kesadaran manusia yang melihat sumber permasalahan hidup lebih diakibatkan oleh struktur dan sistem; sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurutnya hal itu terutama dimunculkan oleh kaum elit (Brazilia) yang berpandangan *borjuis* serta *kapitalis*. Karena kondisi yang tidak human itulah menjadikan manusia sadar, dan kesadaran kritisnya itulah mengemuka dalam bentuk tindakan *transformatif* terhadap sistem dan struktur yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.²⁸

Berdasar pada data tentang tahap kesadaran yang dibangun *marxisme Leninis-Maois*-PKI dan teori tahap kesadaran Paulo Freire, dapat dianalisis bahwa tahap kesadaran *sosialisme* yang *radikal*, *totaliter*, dan *anarkhis marxisme*

²⁴ F.M Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme ...*, hal. 242 - 243.

²⁵ Paulo R.N Freire, *Education for Critical Consciousness* (Cambridge, USA: Masschusetts, 1973), hal. 3 - 20.

²⁶ *Ibid.*, hal. 17.

²⁷ *Ibid.*, hal. 18.

²⁸ *Ibid.*, hal. 18 - 20.

tersebut termasuk dalam tahap kesadaran *semi-intransitif* dan *transitif-naif*. Penyamaan itu didasarkan pada kesamaan jenis perilaku mereka. Yakni mereka cenderung menyederhanakan persoalan dan berperilaku dan berprilaku dibawah standar manusia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari tindakan mereka yang keji dan suka menghalalkan segala cara demi kepentingan diri dan kelompoknya. Di samping mereka sangat *sektarian*, dan merasa paling benar sendiri, sehingga jauh dari karakter yang selalu ingin melakukan *investigasi* dan dibarengi dengan penjelasan-penjelasan yang *fungsional* dan akurat. Pikiran mereka juga dipenuhi dengan angan-angan kosong. Begitu pula kepribadiannya diwarnai oleh kemampuan berargumentasi yang sangat rapuh karena dasar-dasar logikanya yang tidak kokoh. Sehingga diskusi/perdebatan selalu diakhiri dengan ungkapan "pokok-e atau harus begini, begitu, menutup segala kemungkinan yang lebih terbuka, dsb." Jelas yang demikian adalah sikap menutup sendiri (*exclusive*) dan maunya menang sendiri. Juga ditopang dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat *magis* dan *mitis*, seta karakter mereka yang emosional dan senang berpolemik daripada dialog/*komunikasi*.

3. Konsep Dasar Pendidikan Komunisme

Untuk menetapkan konsep dasar pendidikan komunisme, jika didasarkan analisis dari teori pendidikan Paulo Freire yang berdasar pada tahap kesadaran masyarakat yang telah dirumuskannya, yaitu *semi-intransitif*, *transitif-naif*, dan *transitif-kritis*. Langkahnya adalah dengan memperhatikan indikator-indikator yang ada pada tahap kesadaran komunisme (*Marxis-Leninis-Maois-PKI*), kemudian ditafsirkan menurut kriteria teori pendidikan Paulo Freire dimaksud.

Ditilik dari dasar *ontologi* dan *epistemologi*, maka tampak bahwa bagi mereka yang berkesadaran *semi-intransitif* dan *transitif-naif*, *realitas* difahami secara *empiris* (sebagaimana yang tampak). Namun pada saat yang sama *realitas* dipandang sebagai sesuatu yang lain secara *kontradiktif*. Ini disebabkan bukan oleh ketidaktahuan mereka, melainkan justru karena kesengajaan (pada dasarnya tahu tetapi kemudian sengaja pura-pura tidak tahu/membodoh). Jadi subjek *mendominasi* objek dalam rangka rekayasa atau memutarbalikkan fakta. Secara *onologis* dan *epistemologis*, mestinya mereka termasuk berfaham *dualisme*, tetapi

dalam prakteknya mereka memandang *realitas* dengan sebelah mata; yang *empirik* dan *rasional* / dunia dan akherat, ada, tetapi rasional dan atau akherat dibekukan (sengaja tidak mau tahu/pokok-e) demi mengutamakan dunia/ jasmani/*empirik*.

Dengan pandangan dunia seperti itu maka belajar merupakan *pengukuban / absolutisme yang normatif atas pengalaman*. Demikianlah teori belajar yang berkembang pada masyarakat *komunis* yang berkesadaran *semi-intransitif* dan *transitif-naif*. Artinya pengalaman disesuaikan dan diukur dengan *norma* yang dipandang benar (*subjektif*). Ini sesuai dengan kepribadian mereka serta jenis penalaran yang dipeganginya selama ini, yaitu *deduktif*. Dengan demikian pengalaman bukan hal yang pokok melainkan sekedar pelengkap. Sebaliknya subjek / *native* sangat menentukan dalam perolehan pengetahuan.

Akan tetapi karena subjek lebih mendominasi dan justru cenderung mengutamakan pengalaman / konkret, maka terjadi pemutarbalikan kenyataan; yang tidak utama menjadi utama secara sengaja / membodoh, dan berkelanjutan / dilestarikan. Dari itu pula maka sikap *stagnan / statis* (sama dengan *pasrah*) yang berkembang pada masyarakat tersebut. Hal itu berpengaruh pada penerapan *metode belajar* yang bersifat *imitatif* dan tidak mampu mengembangkan dinamika berpikirkannya secara *realistis* yang ilmiah, melainkan lebih bersifat *kontradiktif*. Dari itu pula tentunya *metode pembelajarannya* pun bercorak *instruksional* dan berbentuk *indoktrinasi*. Dari sifatnya yang *stagnan* dan *statis* itu pula, isi dan lingkup pembahasan materinyapun hanya melingkar pada persoalan yang itu-itu saja; rutin, mengulang-ulang, tidak berkembang, tidak *actual* / tidak *up to date* (kadaluwarsa), dan tidak *fungsional*.

Atas pertimbangan itu maka dapat difahami bahwa pada hakekatnya pendidikan mereka bisa diartikan sebagai proses *pelimpahan* materi / kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi lainnya yang coraknya *monoton*. Hasil *edukasi* pada tahap *semi-intransitif* dan *transitif-naif* (sama dengan kesadaran *sosialis Leninis-Maois-PKI*), dan padanya tercermin suatu karakter *sosialis* yang *radikal, totaliter, dan anarkhis*, difahami oleh Paulo Freire mengandung *manipulasi*.²⁹ Artinya pendidikan berlangsung bukan berdasar hubungan manusia dengan dunianya secara objektif.

²⁹ *Ibid.*, hal. 148.

Akan tetapi proses itu merampas hak kemanusiaan atau kebebasannya, karena, dengan meminjam istilah Malcolm Knowles yang dilansir Departemen Kesejahteraan Pendidikan dan Kesehatan Amerika Serikat,³⁰ tentang perbedaan antara *paedagogy* dengan *andragogy*, pendekatan pendidikannya bersifat *paedagogis*. Maksudnya, dalam pendidikan tersebut pendidik dan terdidik didudukkan atas dasar hubungan *dialektis* yang tidak seimbang. Mereka laksana penindas dan yang tertindas, pemerintah dan yang diperintah, guru dan murid atau yang memberi dan yang diberi. Jadi guru sebagai subjek pendidikan (*instruktur*), sedangkan murid sebagai objek pendidikan (yang menerima instruksi).

4. Langkah Edukatif Menangkal Gerakan PKI Anti Hak Asasi Manusia

Dalam tulisan ini Teori *Kritis* Jürgen Habermas sebagai konsep dapat dijadikan langkah nyata untuk menangkal dasar pemikiran komunisme yang anti hak asasi manusia. Alasannya, teori Habermas merupakan *antitesa* pemikiran dasar *Marxis* (sekaligus *Leninis-Maois-PKI*). Di samping terkandung juga di dalamnya pemikiran dasar pendidikannya yang dapat digunakan sebagai penangkal idiologi tersebut (PKI). Untuk itu di sini akan dibahas dua hal, yaitu Teori *Kritis* dan Dasar Pendidikan yang dikembangkan Habermas.

a. Teori Kritis Jürgen Habermas

Bagi Habermas, teori Marx merupakan suatu filsafat sejarah, dan teori ini dapat diberi suatu dasar *empiris*. Artinya bisa digunakan kontrol *empiris* untuk menentukan syarat-syarat objektif yang berlaku bagi berlangsungnya *revolusi*. Dari itu filsafat sejarahnya dengan tujuan *praxis* tidak pernah memiliki suatu kepastian *meta-empiris*, tetapi harus diberi *fondamen* yang kokoh dalam *verifikasi empiris*. Juga teori sosial Marx berdimensi dua yaitu tindakan *instrumental* dan tindakan *komunikatif / reflektif*.

Tindakan *instrumental* ialah tindakan pekerjaan atau produksi, yakni alat-alat kerja, teknologi, serta ketrampilan para pekerja. Manusia berhubungan dengan alam melalui pekerjaan. Untuk itu manusia menciptakan alat-alatnya, mengembangkan kekuatan-kekuatan produktif baru, sehingga dengan cara

³⁰ Malcolm Knowles, *A Trainers Guide to Andragogy*, Revised Edition, (Washington D.C: US Departement of Health, Education and Welfare, 1973).

tersebut manusia merefleksikan diri dan membebaskannya dari kendala-kendala alam. Teori tersebut berdampak pada manusia yang menjadikan diri, *pertama*, sebagai proses perwujudan diri melalui kegiatan produksi. *Kedua*, sebagai proses pendidikan melalui tindakan *revolusioner*.

Teori Marx tersebut, bagi Habermas, hanya menekankan pada dimensi pertama yaitu pekerjaan. Akibatnya dimensi kedua menjadi terabaikan, yang sebenarnya hal itu merupakan syarat kemungkinan *emansipasi* dari hubungan-hubungan kekuasaan karena membuka kedok idiologi-idiologi yang ada yakni dimensi *komunikasi* atau *refleksi*.

Dengan *refleksi* manusia dapat membuka kedok idiologi yang menutupi struktur kekuasaan. Sementara dimensi pertama hanya *mereduksi* manusia pada pekerjaan yang hanya menggunakan tindakan searah dan tidak bersifat *reflektif*. Di lain pihak, Marx memahami *emansipasi* sebagai tujuan yang dapat diusahakan secara *objektif*. Yaitu semata-mata melalui perkembangan tanpa melibatkan *komunikasi* dan *interaksi*. Juga Marx memandang pembebasan manusia dianggap sebagai masalah teknologi. Dengan pandangan hukum *objektif* perkembangan sejarah itulah faham *Marxis* menjadi *saintistik*. Yaitu suatu proses yang bercorak *linear* dan memandang ilmu tentang manusia sepadan dengan ilmu alam.³¹

b. Teori Sosial Emansipatoris Jürgen Habermas

Teori sosial *kritis emansipatoris* Habermas bercorak *praxis*, dan ia berpijak pada teori Karl Marx yang dikritisi dan dikembangkan. Pengembangan dimulai dengan, *pertama*, berdasar pada konsepnya tentang *praxis*, menyegarkan kembali pemikiran-pemikiran *Marxis* yang menyangkut dua pokok masalah yaitu hubungan teori dan *praxis* maupun *materialisme* sejarah. Usaha mencari pertalian teori dan *praxis* ditempuhnya dengan jalan *konsensus* dan *komunikasi*. *Kedua*, berdasar pada konsep *praxis* itu pula ia bermaksud memecahkan jalan buntu yang dihadapi generasi I Teori Kritis.

Penjelasan tersebut tampak pada usahanya merumuskan kembali konsep *rasionalisasi*. Jika menurut Marx perkembangan masyarakat/manusia ditentukan oleh keadaan masyarakat/manusia yang senyatanya (proses kerja/tindakan

³¹Habermas, Jürgen, *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik Atas Rasio Fungsional*, terj: Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 450 – 451.

rasional bertujuan), maka bagi Habermas hal itu sekaligus juga ditentukan oleh *interaksi/komunikasi* (tindakan komunikasi). Di sini Marx tampak lebih menekankan dimensi *epistemologis* pada kerja, bukan pada komunikasi. Padahal keduanya merupakan tindakan dasar masyarakat/manusia. Pada tindakan rasional bertujuan menunjukkan tindakan dasar hubungan manusia dengan alam, dan sifatnya satu arah (subjek ke objek / monolog). Sedangkan tindakan *komunikatif*, mencerminkan tindakan dasar hubungan manusia dengan sesamanya; dua arah timbal-balik/dialog.

Akan tetapi pada kenyataannya, seperti yang difahaminya pada masyarakat Barat, tampak bahwa konsep *rasionalisasi* yang semestinya menunjukkan berjalanya tindakan rasional berutujuan dan tindakan *komunikasi*; hubungan teori dan *praxis*, bersifat sejalan dan berbarengan, malah sebaliknya menjadi timpang. Mereka lebih menekankan pada dimensi kerja. Bersamaan dengan itu pula muncul sistem *kapitalisme*; yang ditopang teknologi dan sistem mekanik. Ini menyebabkan tindakan rasional bertujuan pada masyarakat tradisional, yang dijaga oleh *legitimasi* tradisi kebudayaan (inilah kerangka kerja *institusional tradisional*/dunia kehidupan sosial budaya yang menjamin berkembangnya *interaksi/komunikasi*), menyebabkan penekanan lebih tertuju pada tindakan rasional bertujuan (kerja/produksi). Ini artinya masyarakat kehilangan pemahaman-dirinya yang bersumber pada tindakan *komunikatif* (berbentuk interaksi sosial atas dasar pemahaman dirinya sendiri), diganti dengan model pemahaman/ pengetahuan ilmiah atau saintis/mekanis.

Di sinilah terjadi *reifikas-diri* (pembendaan-diri) manusia ke dalam kategori tindakan rasional bertujuan. Dengan demikian kesadaran manusia yang terbangun adalah kesadaran *teknokrasi*; terarah, terkendali *humanitasnya*, dan berwatak *idiologis*. Pada kesadaran yang seperti ini, kata Habermas, masyarakat telah kehilangan dimensi *etisnya*, dan jelas hal itu merupakan desakan dari atas, bukan berkembang dari bawah/budaya.³²

Melihat kenyataan di atas kemudian ia berupaya merumuskan suatu konsep *rasionalisasi* yang wajar, yang disebutnya dengan *interaksi sosial emansipatoris*, berdasar tindakan *komunikatif*. *Rasionalisasi* yang dimaksudkannya ialah berkenaan

³² Jürgen, Habermas, *Toward a Rational Society*, (London: Hoinemann, 1971), hal. 93 – 122.

dengan perkembangan masyarakat secara seimbang. Hal itu menyangkut tiga hal, yaitu *rasionalisasi* teknis/dimensi kerja, *rasionalisasi praxis*/dimensi interaksi atau komunikasi, dan *rasionalisasi sistem*/dimensi kekuasaan.³³ Makna konsep itu ialah bahwa perkembangan masyarakat/manusia hendaknya terarah kepada bentuk hubungan-hubungan kerja, *kommunikasi*, dan kekuasaan. Dengan *rasionalisasi* ketiganya berarti mereka dapat sekaligus memperluas penguasaan teknis terhadap proses dunia *eksternal* masyarakat/manusia, mampu mengkondisikan situasi *kommunikasi* yang bebas serta *human*, dan akhirnya bisa menetapkan tujuan teknis serta *praxis* diri mereka secara sempurna. Melalui ketiganya, bagi Habermas, perkembangan masyarakat/manusia bisa lebih *human* (sesuai dirinya), tanpa terkendala/terjebak ke dalam *ideologi*.

c. Pemikiran Pendidikan Habermas: sebagai penangkal untuk komunisme/PKI yang anti hak asasi manusia

Pemikiran sosial *kritis emansipatoris* Habermas tersebut tentu berdampak pada konsep dasar pendidikannya. Bagi Keith Morrison, pengaruh pemikiran itu terhadap pendidikannya berupa konsep dasar (teori) pendidikan yang disebutnya "Partisipan Potensial".³⁴ Terkait dengan hal itu maka akan penulis jelaskan konsepnya tentang manusia (subjek pendidikannya), kurikulum, serta metode pembelajarannya. Pembahasan dicukupkan pada tiga hal tersebut, sebab padanya sudah termuat substansi dari konsep pendidikannya.

Konsep manusia menurut Habermas sangat bertolak belakang dengan *Marxis-Leninis-Maois-PKI*. Pada keempat pemikiran yang terakhir, manusia adalah sebagai pribadi yang berkesadaran *semi-intransitif* dan *transitif-naif* sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu. Ini kemudian berdampak pada munculnya tatanan kehidupan masyarakat/manusia yang *sosialis*, namun *radikal, totaliter*, dan *diktator proletariat (ideologis)*. Sebaliknya bagi Habermas, manusia yang digagasnya ialah yang *sosialis-kritis-emansipatoris*. Yakni manusia yang dengan kesadarannya dapat memperluas penguasaan teknis terhadap proses dunia *eksternalnya*, dan mampu mengkondisikan situasi

³³JR. Sensat, *Habermas and Marxism*, (London: Sage Publication, 1979), hal. 42 – 43.

³⁴ Keith Morrison, "Jürgen Habermas", dalam Joy A. Palmer (ed.) *50 Pemikiran Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal. 382.

komunikasi yang bebas dan *human*. Juga bisa menetapkan tujuan teknis serta *praxis* dirinya secara sempurna. Dengan ketiganya, bagi Habermas, dapat menjadikan perkembangan manusia lebih *human* (sesuai dirinya), tanpa terkendala/terjebak ke dalam *ideologi*. Dengan kata lain Habermas bertujuan melakukan *konsensus* dan *komunikasi* terhadap tiga kepentingan *kognitif* masyarakat/manusia, yaitu *teknis*, *praxis*, dan *emansipatoris*. Ini dapat memunculkan masyarakat/manusia yang mampu mengelola dunia *eksternalnya* dengan nuansa pemahaman yang mendalam (dengan *hermeneutik* dan *verstehen*) terhadap realitas kehidupannya, serta dalam tata cara hubungan yang *dialogis*, setara, *komunikatif*, dan *egaliter*.³⁵

Untuk mendukung capaian karakter manusia seperti itu, maka rancangan kurikulumnya harus memuat materi pembelajaran yang mampu menumbuhkan potensi yang terkait dengan ketiga kepentingan *kognitif* tersebut; *teknis*, *praxis*, dan *emansipatoris*. Contohnya ialah materi pembelajaran tentang sadar budaya, kajian sosial, sadar lingkungan, *multikulturalisme*, dsb.³⁶

Adapun metode pembelajarannya ialah dengan model *riset-aksi / teoritis-praxis*. Di sini ketiga kepentingan *kognitif*; *teknis*, *praxis*, dan *emansipatoris*, dapat termanifestasikan apabila dikemas dalam delapan prinsip metode pembelajaran. Metode tersebut tercakup dalam kegiatan yang bentuk *kooperatif* dan *kolaboratif*, diskusi, belajar mandiri, *eksplorasi* lingkungan, *problem solving*, orasi dan seminar agar terdidik mahir berbicara, *reflektif*/perenungan, serta *kritis* dan *transformatif*.

Melalui tiga konsep dasar pendidikannya itu; konsep tentang manusia, kurikulum, dan metode pembelajaran, maka realisasi teori pendidikan *partisipan potensial* yang digagasnya dapat terwujud. Sebab seluruh potensi kedirian masyarakat/manusia berupa tiga kepentingan *kognitif* masyarakat/manusia, yaitu *teknis* (kemampu mengelola dunia *eksternalnya* dengan nuansa pemahaman yang mendalam/*hermeneutik* dan *verstehen* terhadap realitas kehidupannya), *praxis* (kemampuan pengelolaan hubungan yang *dialogis*), dan *emansipatoris* (kemampuan mengkondisikan situasi *komunikatif* yang bebas dan *egaliter*, dapat tumbuh sesuai kemanusiaanya yang etis.

³⁵ *Ibid.*, hal. 386.

³⁶ *Ibid.*, hal. 387.

C. Penutup

Sebagai akhir dari deskripsi, analisis dan diskusi dari keseluruhan tulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila harus terbebas dari *Marxis-Leninis-Maois* dan PKI. Masyarakat Pancasila adalah yang beriman, bertaqwa, dan bermoral, bermartabat dan sopan-santun, yang menjunjung tinggi *Multikulturalisme*, yang bijaksana demokratis, *komunikatif*, dan *dialogis*, serta setara/*egaliter*.
2. Bahwa kepribadian tersebut sangat luhur, karena mencerminkan manusia yang seutuhnya, dan berbudaya sesuai realitas kehidupannya. Masyarakat Indonesia tersebut jauh dari *sosialisme* yang *radikal*, *totaliter*, dan *diktator proletariat*. Dengan demikian, mereka bukan *kapitalis*, *liberal*, dan *saintistik*.
3. Bahwa seluruh karakter terakhir tersebut, bagi Habermas, terbentuk atas dasar penekanannya pada konsep *rasionalisasi* yang timpang. Yakni *partisipan potensial* yang dimiliki masyarakat/manusia (berupa tindakan rasional bertujuan dan tindakan *komunikasi*) yang seharusnya terbina secara seimbang, ternyata dalam prakteknya penekanan hanya tertuju pada tindakan *rasional* bertujuan/tindakan *instrumental*.
4. Bahwa langkah nyata untuk menangkal hal tersebut ialah dengan *kritik ideologi*. Yakni suatu analisis dalam rangka menemukan sisi kelemahan teori *Marxis*, terutama pembelokanya kearah *ideologis* oleh kaum *Marxis-Leninis-Maois* dan PKI. Juga secara *edukatif* harus dirancang suatu tujuan pendidikan yang mampu mewujudkan masyarakat/manusia yang bisa mengembangkan tiga kepentingan *kognitif*, *teknis*, *praxis*, dan *emansipatoris*. Kemudian perlu disiapkan kurikulum yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti materi pembelajaran tentang sadar budaya, kajian sosial, sadar lingkungan, *multikulturalisme*, dsb. Selanjutnya materi itu harus dikemas dengan metode pembelajaran yang berbentuk *riset-aksi / teoritis-praxis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Firos. 2011. *Civil War Ala PKI 1965: Menyingkap Dewan Revolusi PKI*. Jakarta: Accelerate Foundation.
- Freire, Paulo. 1973. *Education for Critical Consciousness*. The English-language edition for it was prepared in association with center for the Study of Development and Social Change Cambridge USA, Masschusetts.
- Habermas, Jürgen. 1971. *Toward a Rational Society*. London: Hoinemann.
- Habermas, Jürgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsional*. Terj: Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Knowles, Malcolm. 1973. *A Trainers Guide to Andragogy*. Revised Edition. Washington D.C, US Departement of Health, Education and Welfare.
- Legge, John D.. 1985. *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*. Terj: oleh Tim PSH. Jakarta: Sinar Harapan.
- Magnis Suseno, Franz. 2000. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Mirah Mahardika. 1997. *PRD Tak Gentar Dinyatakan "OT"*, <http://wikimediafoundation.org//> diunduh 18 April 2012.
- Morrison, Keith. 2003. "Jürgen Habermas", dalam Joy A. Palmer (ed.) *50 Pemikiran Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. Yogyakarta: Jendela.
- Nasution, A.H.. 1989. *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 5 Kenangan Orde Lama*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- PRD.. 1994. *Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik*, www.prd.4-all.org diunduh 18 April 2012.
- Rene Goldman. 1968. "Mao, Maoism and Mao-logy" dalam *Journal of Pacific Affairs*. Vol. 41, No. 4, hal. 566.
- Rodee, C.C. et.al. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sensat, JR.. 1979. *Habermas and Marxism*. London: Sage Publication.

- Soerojo, Soegiarto. 1988. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai: G 30 S PKI dan Peran Bung Karno*. Jakarta: Intermasa.
- Wang, J.C.F.1976. "Values of the Cultural Revolution" dalam *Journal of Communication*, vol. 27, no. 3, hal. 55.
- Wheelwright, E. L., Mc. Farlane, B. (ed.). 1973. *The Chinese Road to Socialism: Economics of the Cultural Revolution*. London: Penguin Books.